



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 228/PMK.07/2009

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.07/2008 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009, telah ditetapkan perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Sumber Daya Alam tahun anggaran berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tatacara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Kas Umum Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.07/2008 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.379/Menhut-II/2008 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009 berasal dari penerimaan :
 - a. Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
 - c. Dana Reboisasi (DR).
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi;
 - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- (3) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi;
 - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lain dalam provinsi yang bersangkutan.
- (4) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2009 didasarkan atas realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009 dan realisasi penyaluran Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2009 didasarkan atas perhitungan realisasi yang dilakukan secara triwulanan melalui rekonsiliasi antara Pemerintah Pusat dan daerah penghasil.
- (3) Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar Rp1.307.096.277.783,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. IIUPH sebesar Rp23.258.770.558,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- b. PSDH sebesar Rp559.469.010.164,00 (lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- c. DR sebesar Rp457.585.421.861,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
- d. Dana Cadangan IIUPH Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp48.134.648.000,00 (empat puluh delapan miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- e. Dana Cadangan PSDH Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp107.003.323.200,00 (seratus tujuh miliar tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah); dan
- f. Dana Cadangan DR Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp111.645.104.000,00 (seratus sebelas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c berasal dari realisasi penerimaan Sumber Daya Alam Kehutanan periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2009.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009 disalurkan untuk provinsi dan kabupaten/kota secara triwulanan dengan periode penyaluran sebagai berikut :
 - a. Triwulan I pada bulan Maret 2009;
 - b. Triwulan II pada bulan Juni 2009;
 - c. Triwulan III pada bulan September 2009; dan
 - d. Triwulan IV pada bulan Desember 2009.
- (3) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, huruf e, dan huruf f berasal dari perkiraan sisa penerimaan Sumber Daya Alam Kehutanan bulan November dan bulan Desember 2009 dan akan ditempatkan dalam Rekening Dana Cadangan Menteri Keuangan Tahun 2009.
- (4) Dalam hal pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atas perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dalam satu Tahun Anggaran dan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tidak mencukupi kebutuhan atau realisasi melebihi pagu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran berjalan, maka dapat dilakukan penyaluran sesuai realisasi penerimaan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009.
- (2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar pelaksanaan transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan yang ditempatkan dalam Rekening Dana Cadangan Menteri Keuangan Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, huruf e, dan huruf f akan disalurkan kepada provinsi dan kabupaten/kota paling lambat akhir bulan Februari 2010 setelah Departemen Kehutanan menyampaikan permintaan penyaluran Sumber Daya Alam Kehutanan perdaerah.
- (5) Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena penyaluran triwulan I dan penyaluran triwulan II yang didasarkan atas alokasi perkiraan maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

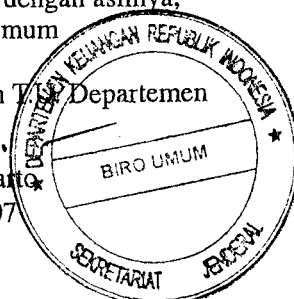
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 513

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 228 /PMK.07/2009 TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN
ANGGARAN 2009

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2009

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	IUPH	PSDH	DR	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	659.246.928,00	775.002.716,00	1.434.249.644,00
1	Kab. Aceh Barat	-	11.986.307,00	-	11.986.307,00
2	Kab. Aceh Besar	-	135.844.647,00	379.640.770,00	515.485.417,00
3	Kab. Aceh Selatan	-	11.986.307,00	-	11.986.307,00
4	Kab. Aceh Singkil	-	11.986.307,00	-	11.986.307,00
5	Kab. Aceh Tengah	-	77.098.041,00	199.575.340,00	276.673.381,00
6	Kab. Aceh Tenggara	-	11.986.307,00	-	11.986.307,00
7	Kab. Aceh Timur	-	23.882.269,00	33.034.405,00	56.916.674,00
8	Kab. Aceh Utara	-	11.986.307,00	-	11.986.307,00
9	Kab. Bireun	-	11.986.307,00	-	11.986.307,00
10	Kab. Pidie	-	52.604.862,00	122.927.878,00	175.532.740,00
11	Kab. Simeulue	-	11.986.307,00	-	11.986.307,00
12	Kota Banda Aceh	-	11.986.307,00	-	11.986.307,00
13	Kota Sabang	-	11.986.307,00	-	11.986.307,00
14	Kota Langsa	-	11.986.307,00	-	11.986.307,00
15	Kota Lhokseumawe	-	11.986.307,00	-	11.986.307,00
16	Kab. Nagan, Raya	-	11.986.307,00	-	11.986.307,00
17	Kab. Aceh Jaya	-	12.115.514,00	-	12.115.514,00
18	Kab. Aceh Barat Daya	-	11.986.307,00	-	11.986.307,00
19	Kab. Gayo Lues	-	11.986.307,00	-	11.986.307,00
20	Kab. Aceh Tamiang	-	11.986.307,00	4.256.115,00	16.242.422,00
21	Kab. Bener Meriah	-	11.986.307,00	-	11.986.307,00
22	Kab. Pidie Jaya	-	19.153.851,00	21.969.390,00	41.123.241,00
23	Kota Subulussalam	-	14.917.446,00	13.598.818,00	28.516.264,00
24	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	-	131.849.386,00	-	131.849.386,00
II	SUMATERA UTARA	79.040.000,00	31.296.559.050,00	22.211.227.540,00	53.586.826.590,00
1	Kab. Asahan	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
2	Kab. Dairi	-	2.484.444.936,00	909.980.567,00	3.394.425.503,00
3	Kab. Deli Serdang	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
4	Kab. Tanah Karo	-	378.173.110,00	66.724,00	378.239.834,00
5	Kab. Labuhan Batu	31.616.000,00	3.655.145.150,00	342.253.448,00	4.029.014.598,00
6	Kab. Langkat	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
7	Kab. Mandailing Natal	-	616.818.154,00	1.264.311.097,00	1.881.129.251,00
8	Kab. Nias	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
9	Kab. Simalungun	-	450.392.434,00	702.523.830,00	1.152.916.264,00
10	Kab. Tapanuli Selatan	-	3.027.442.158,00	2.076.861.380,00	5.104.303.538,00
11	Kab. Tapanuli Tengah	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
12	Kab. Tapanuli Utara	31.616.000,00	3.443.331.300,00	266.174.304,00	3.741.121.604,00
13	Kab. Toba Samosir	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
14	Kota Binjai	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
15	Kota Medan	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
16	Kota Pematang Siantar	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
17	Kota Sibolga	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
18	Kota Tanjung Balai	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
19	Kota Tebing Tinggi	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
20	Kota Padang Sidempuan	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
21	Kab. Pakpak Bharat	-	378.151.092,00	190.654.704,00	568.805.796,00
22	Kab. Nias Selatan	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	521.573.484,00	995.418.551,00	1.516.992.035,00
24	Kab. Serdang Berdagai	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
25	Kab. Samosir	-	574.666.418,00	994.911.602,00	1.569.578.020,00
26	Kab. Batu Bara	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
27	Kab. Padang Lawas Utara	-	430.978.008,00	-	430.978.008,00
28	Kab. Padang Lawas	-	3.045.532.326,00	14.468.071.333,00	17.513.603.659,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	IUPH	PSDH	DR	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)
29	Kab. Labuhan Batu Selatan	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
30	Kab. Labuhan Batu Utara	-	378.151.092,00	-	378.151.092,00
31	Provinsi Sumatera Utara	15.808.000,00	5.483.190.824,00	-	5.498.998.824,00
III	SUMATERA BARAT	-	6.122.499.900,00	4.462.730.153,00	10.585.230.053,00
1	Kab. Limapuluh Kota	-	125.753.500,00	4.179.716,00	129.933.216,00
2	Kab. Agam	-	124.404.292,00	38.383.391,00	162.787.683,00
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	1.132.438.616,00	3.309.266.448,00	4.441.705.064,00
4	Kab. Padang Pariaman	-	124.404.292,00	-	124.404.292,00
5	Kab. Pasaman	-	1.390.564.204,00	112.193.624,00	1.502.757.828,00
6	Kab. Pesisir Selatan	-	130.933.520,00	21.821.048,00	152.754.568,00
7	Kab. Sijunjung	-	124.514.416,00	34.675.259,00	159.189.675,00
8	Kab. Solok	-	127.513.866,00	9.633.156,00	137.147.024,00
9	Kab. Tanah Datar	-	124.682.880,00	2.260.385,00	126.943.265,00
10	Kota Bukit Tinggi	-	124.404.292,00	-	124.404.292,00
11	Kota Padang Panjang	-	124.404.292,00	-	124.404.292,00
12	Kota Padang	-	124.404.292,00	-	124.404.292,00
13	Kota Payakumbuh	-	124.404.292,00	-	124.404.292,00
14	Kota Sawahlunto	-	124.404.292,00	-	124.404.292,00
15	Kota Solok	-	124.404.292,00	-	124.404.292,00
16	Kota Pariaman	-	124.404.292,00	-	124.404.292,00
17	Kab. Pasaman Barat	-	125.247.968,00	96.655.479,00	221.903.447,00
18	Kab. Dharmasraya	-	280.106.743,00	74.251.739,00	354.358.482,00
19	Kab. Solok Selatan	-	321.466.921,00	759.409.906,00	1.080.876.827,00
20	Provinsi Sumatera Barat	-	1.119.638.638,00	-	1.119.638.638,00
IV	RIAU	181.792.000,00	94.978.561.302,00	29.017.903.342,00	124.178.256.644,00
1	Kab. Bengkalis	50.585.600,00	12.998.367.378,00	1.046.769.204,00	14.095.722.182,00
2	Kab. Indragiri Hilir	-	4.999.182.842,00	14.375.351.089,00	19.374.533.931,00
3	Kab. Indragiri Hulu	-	4.322.861.098,00	51.198.440,00	4.374.059.538,00
4	Kab. Kampar	31.616.000,00	11.311.045.524,00	823.591.302,00	12.166.252.826,00
5	Kab. Kuantan Singingi	-	4.500.922.254,00	183.395.670,00	4.684.317.924,00
6	Kab. Pelalawan	15.808.000,00	8.280.568.632,00	1.107.036.598,00	9.403.413.230,00
7	Kab. Rokan Hilir	-	3.882.556.100,00	358.585.354,00	4.241.141.454,00
8	Kab. Rokan Hulu	15.808.000,00	8.087.134.100,00	2.611.898.179,00	10.714.840.279,00
9	Kab. Siak	31.616.000,00	10.163.841.572,00	3.682.711.534,00	13.878.169.106,00
10	Kota Dumai	-	3.798.568.526,00	4.777.365.972,00	8.575.934.498,00
11	Kota Pekanbaru	-	3.772.252.212,00	-	3.772.252.212,00
12	Provinsi Riau	36.358.400,00	18.861.261.064,00	-	18.897.619.464,00
V	KEPULAUAN RIAU	-	5.427.409,00	4.601.674,00	10.029.083,00
1	Kab. Bintan	-	361.827,00	-	361.827,00
2	Kab. Natuna	-	361.827,00	-	361.827,00
3	Kab. Karimun	-	361.827,00	-	361.827,00
4	Kota Batam	-	2.170.965,00	4.601.674,00	6.772.639,00
5	Kota Tanjung Pinang	-	361.827,00	-	361.827,00
6	Kab. Lingga	-	361.827,00	-	361.827,00
7	Kab. Kepulauan Anambas	-	361.827,00	-	361.827,00
8	Provinsi Kepulauan Riau	-	1.085.482,00	-	1.085.482,00
VI	JAMBI	51.066.240,00	27.097.424.102,00	6.511.405.673,00	33.659.896.015,00
1	Kab. Batanghari	-	3.627.028.538,00	396.793.924,00	4.023.822.462,00
2	Kab. Bungo	-	1.170.514.372,00	374.744.129,00	1.545.258.501,00
3	Kab. Kerinci	-	1.124.344.840,00	-	1.124.344.840,00
4	Kab. Merangin	-	1.166.936.354,00	297.956.243,00	1.464.892.597,00
5	Kab. Muaro Jambi	15.808.000,00	2.777.235.224,00	181.266.448,00	2.974.309.672,00
6	Kab. Sarolangun	11.546.240,00	1.549.273.284,00	665.027.326,00	2.225.846.850,00
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	15.808.000,00	3.483.180.074,00	447.768.384,00	3.946.756.458,00
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	3.309.393.883,00	1.748.369.012,00	5.057.762.895,00
9	Kab. Tebo	-	1.211.879.253,00	2.397.881.629,00	3.609.760.882,00
10	Kota Jambi	-	1.123.847.590,00	1.598.578,00	1.125.446.168,00
11	Kota Sungai Penuh	-	937.011.422,00	-	937.011.422,00
12	Provinsi Jambi	7.904.000,00	5.616.779.268,00	-	5.624.683.268,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	IUPH	PSDH	DR	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)
VII	SUMATERA SELATAN	413.056.800,00	27.322.225.223,00	13.282.439.642,00	41.017.721.665,00
1	Kab. Lahat	-	2.410.071.864,00	148.963.486,00	2.559.035.350,00
2	Kab. Musi Banyuasin	165.409.920,00	2.854.030.511,00	12.548.058.325,00	15.567.498.756,00
3	Kab. Musi Rawas	53.494.272,00	2.741.025.566,00	148.963.486,00	2.943.483.324,00
4	Kab. Muara Enim	-	874.405.241,00	5.030.739,00	879.435.980,00
5	Kab. Ogan Komering Ilir	49.855.104,00	5.497.725.128,00	431.423.606,00	5.979.003.838,00
6	Kab. Ogan Komering Ulu	-	916.508.473,00	-	916.508.473,00
7	Kota Palembang	-	710.727.700,00	-	710.727.700,00
8	Kota Pagar Alam	-	710.727.700,00	-	710.727.700,00
9	Kota Lubuk Linggau	-	710.727.700,00	-	710.727.700,00
10	Kota Prabumulih	-	710.727.700,00	-	710.727.700,00
11	Kab. Banyuasin	36.599.680,00	728.123.316,00	-	764.722.996,00
12	Kab. Ogan Ilir	-	710.727.700,00	-	710.727.700,00
13	Kab. OKU Timur	-	919.466.328,00	-	919.466.328,00
14	Kab. OKU Selatan	25.086.464,00	902.831.908,00	-	927.918.372,00
15	Kab. Empat Lawang	-	949.304.488,00	-	949.304.488,00
16	Provinsi Sumatera Selatan	82.611.360,00	4.975.093.900,00	-	5.057.705.260,00
VIII	BANGKA BELITUNG	-	537.507.135,00	603.908.364,00	1.141.415.499,00
1	Kab. Bangka	-	199.506.161,00	553.247.197,00	752.753.358,00
2	Kab. Belitung	-	36.805.060,00	6.316.299,00	43.121.359,00
3	Kota Pangkal Pinang	-	35.833.809,00	-	35.833.809,00
4	Kab. Bangka Selatan	-	35.833.809,00	-	35.833.809,00
5	Kab. Bangka Tengah	-	38.234.001,00	12.584.195,00	50.818.196,00
6	Kab. Bangka Barat	-	38.633.193,00	6.331.073,00	44.964.266,00
7	Kab. Belitung Timur	-	45.159.675,00	25.429.600,00	70.589.275,00
8	Provinsi Bangka Belitung	-	107.501.427,00	-	107.501.427,00
IX	BENGKULU	-	-	-	-
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	-	-
2	Kab. Bengkulu Utara	-	-	-	-
3	Kab. Rejang Lebong	-	-	-	-
4	Kota Bengkulu	-	-	-	-
5	Kab. Kaur	-	-	-	-
6	Kab. Seluma	-	-	-	-
7	Kab. Mukomuko	-	-	-	-
8	Kab. Lebong	-	-	-	-
9	Kab. Kepahiang	-	-	-	-
10	Kab. Bengkulu Tengah	-	-	-	-
11	Provinsi Bengkulu	-	-	-	-
X	LAMPUNG	-	727.184.241,00	13.712.554,00	740.896.795,00
1	Kab. Lampung Barat	-	29.268.712,00	-	29.268.712,00
2	Kab. Lampung Selatan	-	29.268.712,00	-	29.268.712,00
3	Kab. Lampung Tengah	-	29.268.712,00	-	29.268.712,00
4	Kab. Lampung Utara	-	163.855.992,00	13.712.554,00	177.568.546,00
5	Kab. Lampung Timur	-	29.268.712,00	-	29.268.712,00
6	Kab. Tanggamus	-	29.268.712,00	-	29.268.712,00
7	Kab. Tulang Bawang	-	128.846.765,00	-	128.846.765,00
8	Kab. Way Kanan	-	65.581.624,00	-	65.581.624,00
9	Kota Bandar Lampung	-	29.268.712,00	-	29.268.712,00
10	Kota Metro	-	29.268.712,00	-	29.268.712,00
11	Kab. Pesawaran	-	17.675.308,00	-	17.675.308,00
12	Provinsi Lampung	-	146.343.568,00	-	146.343.568,00
XI	DKI JAKARTA	-	-	-	-
XII	JAWA BARAT	-	14.293.596.835,00	-	14.293.596.835,00
1	Kab. Bandung	-	569.652.986,00	-	569.652.986,00
2	Kab. Bekasi	-	191.647.114,00	-	191.647.114,00
3	Kab. Bogor	-	246.456.968,00	-	246.456.968,00
4	Kab. Ciamis	-	1.674.318.634,00	-	1.674.318.634,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	IUPH	PSDH	DR	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)
5	Kab. Cianjur	-	1.720.393.151,00	-	1.720.393.151,00
6	Kab. Cirebon	-	199.487.397,00	-	199.487.397,00
7	Kab. Garut	-	959.485.626,00	-	959.485.626,00
8	Kab. Indramayu	-	642.207.114,00	-	642.207.114,00
9	Kab. Karawang	-	191.647.114,00	-	191.647.114,00
10	Kab. Kuningan	-	509.304.784,00	-	509.304.784,00
11	Kab. Majalengka	-	396.449.294,00	-	396.449.294,00
12	Kab. Purwakarta	-	313.348.168,00	-	313.348.168,00
13	Kab. Subang	-	247.873.159,00	-	247.873.159,00
14	Kab. Sukabumi	-	574.209.470,00	-	574.209.470,00
15	Kab. Sumedang	-	395.758.790,00	-	395.758.790,00
16	Kab. Tasikmalaya	-	601.414.100,00	-	601.414.100,00
17	Kota Bandung	-	191.647.114,00	-	191.647.114,00
18	Kota Bekasi	-	191.647.114,00	-	191.647.114,00
19	Kota Bogor	-	191.647.114,00	-	191.647.114,00
20	Kota Cirebon	-	191.647.114,00	-	191.647.114,00
21	Kota Depok	-	191.647.114,00	-	191.647.114,00
22	Kota Sukabumi	-	191.647.114,00	-	191.647.114,00
23	Kota Cimahi	-	191.647.114,00	-	191.647.114,00
24	Kota Tasikmalaya	-	191.647.114,00	-	191.647.114,00
25	Kota Banjar	-	361.524.148,00	-	361.524.148,00
26	Kab. Bandung Barat	-	569.652.986,00	-	569.652.986,00
27	Provinsi Jawa Barat	-	2.395.588.920,00	-	2.395.588.920,00
XIII	BANTEN	-	2.359.428.579,00	-	2.359.428.579,00
1	Kab. Lebak	-	214.939.449,00	-	214.939.449,00
2	Kab. Pandeglang	-	815.900.174,00	-	815.900.174,00
3	Kab. Serang	-	297.749.334,00	-	297.749.334,00
4	Kab. Tangerang	-	147.262.803,00	-	147.262.803,00
5	Kota Cilegon	-	147.262.803,00	-	147.262.803,00
6	Kota Tangerang	-	147.262.803,00	-	147.262.803,00
7	Kota Serang	-	147.262.803,00	-	147.262.803,00
8	Provinsi Banten	-	441.788.410,00	-	441.788.410,00
XIV	JAWA TENGAH	-	26.195.759.836,00	-	26.195.759.836,00
1	Kab. Banjarnegara	-	305.764.977,00	-	305.764.977,00
2	Kab. Banyumas	-	352.048.978,00	-	352.048.978,00
3	Kab. Batang	-	765.677.693,00	-	765.677.693,00
4	Kab. Blora	-	6.102.044.142,00	-	6.102.044.142,00
5	Kab. Boyolali	-	373.253.114,00	-	373.253.114,00
6	Kab. Brebes	-	723.871.740,00	-	723.871.740,00
7	Kab. Cilacap	-	850.128.068,00	-	850.128.068,00
8	Kab. Demak	-	295.426.320,00	-	295.426.320,00
9	Kab. Grobogan	-	1.028.766.515,00	-	1.028.766.515,00
10	Kab. Jepara	-	383.389.358,00	-	383.389.358,00
11	Kab. Karanganyar	-	294.851.022,00	-	294.851.022,00
12	Kab. Kebumen	-	316.332.695,00	-	316.332.695,00
13	Kab. Kendal	-	685.316.408,00	-	685.316.408,00
14	Kab. Klaten	-	294.744.283,00	-	294.744.283,00
15	Kab. Kudus	-	294.937.424,00	-	294.937.424,00
16	Kab. Magelang	-	298.159.092,00	-	298.159.092,00
17	Kab. Pati	-	412.514.987,00	-	412.514.987,00
18	Kab. Pekalongan	-	314.411.149,00	-	314.411.149,00
19	Kab. Pemasang	-	720.967.070,00	-	720.967.070,00
20	Kab. Purbalingga	-	298.393.335,00	-	298.393.335,00
21	Kab. Purworejo	-	301.137.634,00	-	301.137.634,00
22	Kab. Rembang	-	1.221.435.965,00	-	1.221.435.965,00
23	Kab. Semarang	-	347.713.405,00	-	347.713.405,00
24	Kab. Sragen	-	294.930.718,00	-	294.930.718,00
25	Kab. Sukoharjo	-	294.740.565,00	-	294.740.565,00
26	Kab. Tegal	-	697.882.622,00	-	697.882.622,00
27	Kab. Temanggung	-	446.710.115,00	-	446.710.115,00
28	Kab. Wonogiri	-	341.389.773,00	-	341.389.773,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	IIUPH	PSDH	DR	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)
29	Kab. Wonosobo	-	305.475.429,00	-	305.475.429,00
30	Kota Magelang	-	294.740.565,00	-	294.740.565,00
31	Kota Pekalongan	-	294.740.565,00	-	294.740.565,00
32	Kota Salatiga	-	294.740.565,00	-	294.740.565,00
33	Kota Semarang	-	349.052.802,00	-	349.052.802,00
34	Kota Surakarta	-	294.740.565,00	-	294.740.565,00
35	Kota Tegal	-	294.740.565,00	-	294.740.565,00
36	Provinsi Jawa Tengah	-	5.010.589.613,00	-	5.010.589.613,00
XV	D.I. YOGYAKARTA	-	9.053.600,00	-	9.053.600,00
1	Kab. Bantul	-	905.360,00	-	905.360,00
2	Kab. Gunung Kidul	-	3.556.640,00	-	3.556.640,00
3	Kab. Kulon Progo	-	970.160,00	-	970.160,00
4	Kab. Sleman	-	905.360,00	-	905.360,00
5	Kota Yogyakarta	-	905.360,00	-	905.360,00
6	Provinsi DI Yogyakarta	-	1.810.720,00	-	1.810.720,00
XVI	JAWA TIMUR	-	24.610.162.637,00	-	24.610.162.637,00
1	Kab. Bangkalan	-	242.708.793,00	-	242.708.793,00
2	Kab. Banyuwangi	-	2.285.546.472,00	-	2.285.546.472,00
3	Kab. Blitar	-	482.952.707,00	-	482.952.707,00
4	Kab. Bojonegoro	-	1.974.572.280,00	-	1.974.572.280,00
5	Kab. Bondowoso	-	280.831.478,00	-	280.831.478,00
6	Kab. Gresik	-	249.873.508,00	-	249.873.508,00
7	Kab. Jember	-	562.950.828,00	-	562.950.828,00
8	Kab. Jombang	-	484.382.432,00	-	484.382.432,00
9	Kab. Kediri	-	574.149.055,00	-	574.149.055,00
10	Kab. Lamongan	-	582.426.893,00	-	582.426.893,00
11	Kab. Lumajang	-	370.023.956,00	-	370.023.956,00
12	Kab. Madiun	-	1.605.949.831,00	-	1.605.949.831,00
13	Kab. Magetan	-	247.841.158,00	-	247.841.158,00
14	Kab. Malang	-	769.269.172,00	-	769.269.172,00
15	Kab. Mojokerto	-	324.688.293,00	-	324.688.293,00
16	Kab. Nganjuk	-	610.569.853,00	-	610.569.853,00
17	Kab. Ngawi	-	1.254.036.428,00	-	1.254.036.428,00
18	Kab. Pacitan	-	243.109.654,00	-	243.109.654,00
19	Kab. Pamekasan	-	242.264.445,00	-	242.264.445,00
20	Kab. Pasuruan	-	361.460.916,00	-	361.460.916,00
21	Kab. Ponorogo	-	766.051.618,00	-	766.051.618,00
22	Kab. Probolinggo	-	442.974.800,00	-	442.974.800,00
23	Kab. Sampang	-	242.264.445,00	-	242.264.445,00
24	Kab. Sidoarjo	-	242.264.445,00	-	242.264.445,00
25	Kab. Situbondo	-	251.286.767,00	-	251.286.767,00
26	Kab. Sumenep	-	433.173.184,00	-	433.173.184,00
27	Kab. Trenggalek	-	413.290.538,00	-	413.290.538,00
28	Kab. Tuban	-	1.118.779.612,00	-	1.118.779.612,00
29	Kab. Tulungagung	-	281.751.057,00	-	281.751.057,00
30	Kota Blitar	-	242.264.445,00	-	242.264.445,00
31	Kota Kediri	-	242.264.445,00	-	242.264.445,00
32	Kota Madiun	-	242.264.445,00	-	242.264.445,00
33	Kota Malang	-	242.264.445,00	-	242.264.445,00
34	Kota Mojokerto	-	242.264.445,00	-	242.264.445,00
35	Kota Pasuruan	-	242.264.445,00	-	242.264.445,00
36	Kota Probolinggo	-	242.264.445,00	-	242.264.445,00
37	Kota Surabaya	-	242.264.445,00	-	242.264.445,00
38	Kota Batu	-	248.710.214,00	-	248.710.214,00
39	Provinsi Jawa Timur	-	4.481.892.245,00	-	4.481.892.245,00
XVII	KALIMANTAN BARAT	301.350.400,00	12.483.431.524,00	17.196.610.429,00	29.981.392.353,00
1	Kab. Bengkayang	-	375.464.144,00	184.266,00	375.648.410,00
2	Kab. Landak	-	375.464.144,00	1.781.138,00	377.245.282,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	IUPH	PSDH	DR	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)
3	Kab. Kapuas Hulu	-	705.004.132,00	1.241.681.552,00	1.946.685.684,00
4	Kab. Ketapang	241.080.320,00	2.246.605.886,00	6.376.432.217,00	8.864.118.423,00
5	Kab. Pontianak	-	472.189.830,00	476.286.498,00	948.476.328,00
6	Kab. Sambas	-	413.268.657,00	1.923.448,00	415.192.105,00
7	Kab. Sanggau	-	466.212.155,00	75.767.332,00	541.979.487,00
8	Kab. Sintang	-	1.532.497.008,00	3.875.926.656,00	5.408.423.664,00
9	Kota Pontianak	-	375.464.144,00	-	375.464.144,00
10	Kota Singkawang	-	375.464.144,00	-	375.464.144,00
11	Kab. Sekadau	-	375.464.144,00	59.498,00	375.523.642,00
12	Kab. Melawi	-	1.069.820.333,00	4.333.679.733,00	5.403.500.066,00
13	Kab. Kayong Utara	-	375.464.144,00	-	375.464.144,00
14	Kab. Kubu Raya	-	884.531.720,00	812.888.091,00	1.697.419.811,00
15	Provinsi Kalimantan Barat	60.270.080,00	2.440.516.939,00	-	2.500.787.019,00
XVIII	KALIMANTAN TENGAH	2.224.515.818,00	85.935.895.186,00	119.250.392.567,00	207.410.803.571,00
1	Kab. Barito Selatan	-	3.715.930.733,00	1.443.620.778,00	5.159.551.511,00
2	Kab. Barito Utara	-	3.396.477.572,00	13.154.427.023,00	16.550.904.595,00
3	Kab. Kapuas	1.528.469.999,00	6.545.305.007,00	4.825.995.552,00	12.899.770.558,00
4	Kab. Kotawaringin Barat	2.902.016,00	4.480.331.632,00	3.075.321.320,00	7.558.554.968,00
5	Kab. Kotawaringin Timur	20.716.800,00	4.639.147.596,00	7.651.755.261,00	12.311.619.657,00
6	Kota Palangkaraya	-	2.601.895.076,00	5.886.259,00	2.607.781.335,00
7	Kab. Barito Timur	-	2.600.195.148,00	-	2.600.195.148,00
8	Kab. Murung Raya	128.000.000,00	7.629.320.090,00	18.874.457.163,00	26.631.777.253,00
9	Kab. Pulang Pisau	-	2.600.195.148,00	-	2.600.195.148,00
10	Kab. Gunung Mas	99.523.840,00	2.056.977.261,00	1.730.573.529,00	3.887.074.630,00
11	Kab. Lamandau	-	5.249.643.448,00	10.265.570.807,00	15.515.214.255,00
12	Kab. Sukamara	-	2.600.195.148,00	49.402.388,00	2.649.597.536,00
13	Kab. Kalingan	-	9.116.953.303,00	24.135.358.175,00	33.252.311.478,00
14	Kab. Seruyan	-	11.802.059.558,00	34.038.024.312,00	45.840.083.870,00
15	Provinsi Kalimantan Tengah	444.903.163,00	16.901.268.466,00	-	17.346.171.629,00
XIX	KALIMANTAN SELATAN	58.936.800,00	3.007.729.474,00	2.610.364.304,00	5.677.030.578,00
1	Kab. Banjar	-	161.800.120,00	5.720.360,00	167.320.480,00
2	Kab. Barito Kuala	-	350.382.874,00	553.386.030,00	903.768.904,00
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	98.941.782,00	-	98.941.782,00
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	98.941.782,00	-	98.941.782,00
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	98.941.782,00	-	98.941.782,00
6	Kab. Kota Baru	-	364.713.178,00	495.991.184,00	860.704.362,00
7	Kab. Tabalong	-	452.094.215,00	1.418.053.018,00	1.870.147.233,00
8	Kab. Tanah Laut	-	168.891.105,00	10.622.914,00	179.514.019,00
9	Kab. Tapin	-	99.253.884,00	996.164,00	100.250.048,00
10	Kota Banjar Baru	-	98.941.782,00	-	98.941.782,00
11	Kota Banjarmasin	-	98.941.782,00	-	98.941.782,00
12	Kab. Balangan	-	105.148.890,00	19.811.722,00	124.960.612,00
13	Kab. Tanah Bumbu	47.149.440,00	217.285.610,00	105.782.912,00	370.217.962,00
14	Provinsi Kalimantan Selatan	11.787.360,00	593.650.688,00	-	605.438.048,00
XX	KALIMANTAN TIMUR	3.040.000.000,00	94.170.531.368,00	126.230.659.053,00	223.441.190.421,00
1	Kab. Berau	680.960.000,00	12.763.906.282,00	31.121.052.776,00	44.565.919.058,00
2	Kab. Bulungan	535.040.000,00	8.125.303.633,00	20.648.804.336,00	29.309.147.969,00
3	Kab. Kutai Kartanegara	-	5.061.086.547,00	2.794.451.589,00	7.855.538.136,00
4	Kab. Kutai Barat	-	9.637.696.348,00	25.369.567.513,00	35.007.263.861,00
5	Kab. Kutai Timur	-	6.436.252.372,00	14.726.045.924,00	21.162.298.296,00
6	Kab. Malinau	1.216.000.000,00	5.690.967.693,00	10.373.079.680,00	17.280.047.373,00
7	Kab. Nunukan	-	5.065.288.468,00	9.108.063.319,00	14.173.351.787,00
8	Kab. Paser	-	5.666.260.314,00	10.401.716.706,00	16.067.977.020,00
9	Kota Balikpapan	-	2.811.030.624,00	-	2.811.030.624,00
10	Kota Bontang	-	2.808.774.458,00	-	2.808.774.458,00
11	Kota Samarinda	-	2.808.774.458,00	-	2.808.774.458,00
12	Kota Tarakan	-	2.808.774.458,00	7.991.682,00	2.816.766.140,00
13	Kab. Penajam Paser Utara	-	3.186.850.815,00	710.732.586,00	3.897.583.401,00
14	Kab. Tana Tidung	-	3.042.530.916,00	969.152.942,00	4.011.683.858,00
15	Provinsi Kalimantan Timur	608.000.000,00	18.257.033.982,00	-	18.865.033.982,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	IUPH	PSDH	DR	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)
XXI	SULAWESI UTARA	-	832.996.466,00	1.140.417.934,00	1.973.414.400,00
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	48.468.406,00	104.177.434,00	152.645.840,00
2	Kab. Minahasa	-	23.010.728,00	-	23.010.728,00
3	Kab. Sangihe	-	23.010.728,00	-	23.010.728,00
4	Kota Bitung	-	23.010.728,00	-	23.010.728,00
5	Kota Manado	-	23.010.728,00	-	23.010.728,00
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	27.052.379,00	11.078.118,00	38.130.497,00
7	Kab. Minahasa Selatan	-	23.010.728,00	-	23.010.728,00
8	Kota Tomohon	-	23.010.728,00	-	23.010.728,00
9	Kab. Minahasa Utara	-	23.010.728,00	-	23.010.728,00
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	23.010.728,00	-	23.010.728,00
11	Kota Kotamobagu	-	23.350.241,00	-	23.350.241,00
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	307.130.815,00	1.016.878.731,00	1.324.009.546,00
13	Kab. Minahasa Tenggara	-	23.010.728,00	-	23.010.728,00
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	31.178.888,00	2.425.851,00	33.604.739,00
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	27.644.083,00	5.857.800,00	33.501.883,00
16	Provinsi Sulawesi Utara	-	161.075.102,00	-	161.075.102,00
XXII	GORONTALO	-	1.600.455.447,00	1.815.573.977,00	3.416.029.424,00
1	Kab. Boalemo	-	124.239.720,00	7.406.068,00	131.645.788,00
2	Kab. Gorontalo	-	182.876.137,00	73.827.191,00	256.703.328,00
3	Kota Gorontalo	-	122.214.682,00	-	122.214.682,00
4	Kab. Pohuwato	-	565.847.008,00	1.622.472.830,00	2.188.319.838,00
5	Kab. Bone Bolango	-	127.450.420,00	19.148.388,00	146.598.808,00
6	Kab. Gorontalo Utara	-	172.290.776,00	92.719.500,00	265.010.276,00
7	Provinsi Gorontalo	-	305.536.704,00	-	305.536.704,00
XXIII	SULAWESI TENGAH	-	3.162.914.080,00	3.596.979.713,00	6.759.893.793,00
1	Kab. Banggai	-	484.109.590,00	1.323.852.859,00	1.807.962.449,00
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	111.104.177,00	-	111.104.177,00
3	Kab. Buol	-	200.646.336,00	122.435.228,00	323.081.564,00
4	Kab. Toli-Toli	-	279.378.324,00	569.348.418,00	848.726.742,00
5	Kab. Donggala	-	221.471.389,00	151.588.543,00	373.059.932,00
6	Kab. Morowali	-	371.947.204,00	870.279.282,00	1.242.226.486,00
7	Kab. Poso	-	201.875.637,00	131.186.095,00	333.061.732,00
8	Kota Palu	-	111.104.177,00	322.436,00	111.426.613,00
9	Kab. Parigi Moutong	-	344.743.086,00	225.211.768,00	569.954.854,00
10	Kab. Tojo Una Una	-	169.090.629,00	202.755.084,00	371.845.713,00
11	Kab. Sigi	-	111.922.644,00	-	111.922.644,00
12	Provinsi Sulawesi Tengah	-	555.520.887,00	-	555.520.887,00
XXIV	SULAWESI SELATAN	-	96.019.098,00	77.135.129,00	173.154.227,00
1	Kab. Bantaeng	-	1.669.897,00	-	1.669.897,00
2	Kab. Barru	-	1.669.897,00	-	1,669.897,00
3	Kab. Bone	-	1,669.897,00	-	1,669.897,00
4	Kab. Butukumba	-	1,669.897,00	-	1,669.897,00
5	Kab. Enrekang	-	3.122.586,00	-	3.122.586,00
6	Kab. Gowa	-	1,669.897,00	-	1,669.897,00
7	Kab. Jeneponto	-	1,669.897,00	-	1,669.897,00
8	Kab. Luwu	-	2.679.984,00	-	2,679.984,00
9	Kab. Luwu Utara	-	14.009.762,00	-	14.009.762,00
10	Kab. Maros	-	1,669.897,00	-	1,669.897,00
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	1,669.897,00	-	1,669.897,00
12	Kab. Pinrang	-	1,669.897,00	-	1,669.897,00
13	Kab. Selayar	-	1,669.897,00	-	1,669.897,00
14	Kab. Sidenreng Rappang	-	7.183.411,00	-	7.183.411,00
15	Kab. Sinjai	-	1,669.897,00	-	1,669.897,00
16	Kab. Soppeng	-	1,669.897,00	-	1,669.897,00
17	Kab. Takalar	-	1,669.897,00	-	1,669.897,00
18	Kab. Tana Toraja	-	1.979.983,00	-	1.979.983,00
19	Kab. Wajo	-	1,669.897,00	-	1,669.897,00
20	Kota Pare-pare	-	1,669.897,00	-	1,669.897,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	IUPH	PSDH	DR	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)
21	Kota Makassar	-	1.669.897,00	-	1.669.897,00
22	Kota Palopo	-	1.669.897,00	-	1.669.897,00
23	Kab. Luwu Timur	-	17.781.404,00	77.135.129,00	94.916.533,00
24	Kab. Toraja Utara	-	1.669.897,00	-	1.669.897,00
25	Provinsi Sulawesi Selatan	-	19.203.822,00	-	19.203.822,00
XXV	SULAWESI BARAT	-	2.367.217.919,00	2.646.730.800,00	5.013.948.719,00
1	Kab. Majene	-	243.572.626,00	-	243.572.626,00
2	Kab. Mamuju	-	894.798.420,00	2.613.181.004,00	3.507.979.424,00
3	Kab. Polewali Mandar	-	250.464.380,00	12.647.206,00	263.111.586,00
4	Kab. Mamasa	-	245.380.838,00	3.402.558,00	248.783.396,00
5	Kab. Mamuju Utara	-	245.856.406,00	17.500.032,00	263.356.438,00
6	Provinsi Sulawesi Barat	-	487.145.249,00	-	487.145.249,00
XXVI	SULAWESI TENGGARA	-	1.617.547.220,00	1.899.849.044,00	3.517.396.264,00
1	Kab. Buton	-	61.513.540,00	15.472.080,00	76.985.620,00
2	Kab. Konawe	-	66.636.162,00	25.155.680,00	91.791.842,00
3	Kab. Kolaka	-	198.578.792,00	449.796.812,00	648.375.604,00
4	Kab. Muna	-	58.819.898,00	-	58.819.898,00
5	Kota Kendari	-	58.819.898,00	-	58.819.898,00
6	Kota Bau-bau	-	58.819.898,00	-	58.819.898,00
7	Kab. Konawe Selatan	-	65.880.414,00	22.723.402,00	88.603.816,00
8	Kab. Bombana	-	60.482.930,00	5.352.260,00	65.835.190,00
9	Kab. Wakatobi	-	58.819.898,00	-	58.819.898,00
10	Kab. Kolaka Utara	-	288.444.950,00	739.019.980,00	1.027.464.930,00
11	Kab. Konawe Utara	-	250.910.334,00	618.219.444,00	869.129.778,00
12	Kab. Buton Utara	-	66.311.062,00	24.109.386,00	90.420.448,00
13	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	323.509.444,00	-	323.509.444,00
XXVII	BALI	-	-	-	-
1	Kab. Badung	-	-	-	-
2	Kab. Bangli	-	-	-	-
3	Kab. Buleleng	-	-	-	-
4	Kab. Gianyar	-	-	-	-
5	Kab. Jembrana	-	-	-	-
6	Kab. Karangasem	-	-	-	-
7	Kab. Klungkung	-	-	-	-
8	Kab. Tabanan	-	-	-	-
9	Kota Denpasar	-	-	-	-
10	Provinsi Bali	-	-	-	-
XXVIII	NUSA TENGGARA BARAT	-	146.272.282,00	217.384.100,00	363.656.382,00
1	Kab. Bima	-	49.786.852,00	217.384.100,00	267.170.952,00
2	Kab. Dompu	-	6.500.990,00	-	6.500.990,00
3	Kab. Lombok Barat	-	6.500.990,00	-	6.500.990,00
4	Kab. Lombok Tengah	-	6.500.990,00	-	6.500.990,00
5	Kab. Lombok Timur	-	6.500.990,00	-	6.500.990,00
6	Kab. Sumbawa	-	10.444.386,00	-	10.444.386,00
7	Kota Mataram	-	6.500.990,00	-	6.500.990,00
8	Kota Bima	-	6.500.990,00	-	6.500.990,00
9	Kab. Sumbawa Barat	-	11.279.657,00	-	11.279.657,00
10	Kab. Lombok Utara	-	6.500.990,00	-	6.500.990,00
11	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	29.254.457,00	-	29.254.457,00
XXIX	NUSA TENGGARA TIMUR	-	321.872.034,00	-	321.872.034,00
1	Kab. Alor	-	63.391.003,00	-	63.391.003,00
2	Kab. Belu	-	6.776.253,00	-	6.776.253,00
3	Kab. Ende	-	31.599.040,00	-	31.599.040,00
4	Kab. Flores Timur	-	7.541.281,00	-	7.541.281,00
5	Kab. Kupang	-	6.792.987,00	-	6.792.987,00
6	Kab. Lembata	-	6.776.253,00	-	6.776.253,00
7	Kab. Manggarai	-	6.776.253,00	-	6.776.253,00
8	Kab. Ngada	-	6.776.253,00	-	6.776.253,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	IUPH	PSDH	DR	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)
9	Kab. Sikka	-	43.232.174,00	-	43.232.174,00
10	Kab. Sumba Barat	-	6.776.253,00	-	6.776.253,00
11	Kab. Sumba Timur	-	10.073.598,00	-	10.073.598,00
12	Kab. Timor Tengah Selatan	-	6.776.253,00	-	6.776.253,00
13	Kab. Timor Tengah Utara	-	6.776.253,00	-	6.776.253,00
14	Kota Kupang	-	6.776.253,00	-	6.776.253,00
15	Kab. Rote Ndao	-	6.776.253,00	-	6.776.253,00
16	Kab. Manggarai Barat	-	6.776.253,00	-	6.776.253,00
17	Kab. Nagekeo	-	6.776.253,00	-	6.776.253,00
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	6.776.253,00	-	6.776.253,00
19	Kab. Sumba Tengah	-	6.776.253,00	-	6.776.253,00
20	Kab. Manggarai Timur	-	6.776.253,00	-	6.776.253,00
21	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	64.374.409,00	-	64.374.409,00
XXX	MALUKU	3.439.224.600,00	8.916.833.400,00	14.160.878.964,00	26.516.936.964,00
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.710.560.000,00	344.324.784,00	-	2.054.884.784,00
2	Kab. Maluku Tengah	985.500.000,00	701.946.450,00	1.286.369.108,00	2.973.815.558,00
3	Kab. Maluku Tenggara	-	384.652.148,00	466.561.930,00	851.214.078,00
4	Kab. Pulau Buru	55.319.680,00	1.769.837.382,00	5.832.599.278,00	7.657.756.340,00
5	Kota Ambon	-	344.324.784,00	-	344.324.784,00
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	345.941.487,00	2.702.942,00	348.644.429,00
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	680.762.403,00	1.763.935.630,00	2.444.698.033,00
8	Kab. Kepulauan Aru	-	379.222.988,00	339.764.109,00	718.987.097,00
9	Kota Tual	-	344.324.784,00	-	344.324.784,00
10	Kab. Maluku Barat Daya	-	344.324.784,00	-	344.324.784,00
11	Kab. Buru Selatan	-	1.555.547.483,00	4.468.945.967,00	6.024.493.450,00
12	Provinsi Maluku	687.844.920,00	1.721.623.923,00	-	2.409.468.843,00
XXXI	MALUKU UTARA	665.752.500,00	10.031.507.096,00	14.976.019.976,00	25.673.279.572,00
1	Kab. Halmahera Tengah	-	1.256.547.739,00	3.162.295.226,00	4.418.842.965,00
2	Kab. Halmahera Barat	-	573.679.080,00	106.908.616,00	680.587.696,00
3	Kota Ternate	-	573.228.977,00	56.293.074,00	629.522.051,00
4	Kab. Halmahera Timur	-	1.461.865.714,00	3.637.051.260,00	5.098.916.974,00
5	Kota Tidore Kepulauan	-	802.510.249,00	1.026.189.478,00	1.828.699.727,00
6	Kab. Kepulauan Sula	-	736.860.292,00	587.123.571,00	1.323.983.863,00
7	Kab. Halmahera Selatan	532.602.000,00	1.726.125.788,00	4.918.207.611,00	7.176.935.399,00
8	Kab. Halmahera Utara	-	894.387.837,00	1.481.951.140,00	2.376.338.977,00
9	Provinsi Maluku Utara	133.150.500,00	2.006.301.420,00	-	2.139.451.920,00
XXXII	PAPUA	6.225.957.900,00	36.483.471.337,00	38.133.637.689,00	80.843.066.926,00
1	Kab. Biak Numfor	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
2	Kab. Jayapura	751.590.000,00	901.072.862,00	988.474.532,00	2.641.137.394,00
3	Kab. Jayawijaya	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
4	Kab. Merauke	1.216.000.000,00	637.464.523,00	579.162.571,00	2.432.627.094,00
5	Kab. Mimika	-	1.027.902.890,00	2.092.867.692,00	3.120.770.582,00
6	Kab. Nabire	-	1.462.801.798,00	3.297.188.478,00	4.759.990.276,00
7	Kab. Paniai	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
8	Kab. Puncak Jaya	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
9	Kab. Yapen Waropen	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
10	Kota Jayapura	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
11	Kab. Sarmi	-	4.628.001.704,00	6.125.356.897,00	10.753.358.601,00
12	Kab. Keerom	-	1.170.267.396,00	2.526.058.562,00	3.696.325.958,00
13	Kab. Yahukimo	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
14	Kab. Pegunungan Bintang	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
15	Kab. Tolikara	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
16	Kab. Boven Digoel	3.200.000.000,00	3.361.669.587,00	11.447.028.923,00	18.008.698.510,00
17	Kab. Mappi	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
18	Kab. Asmat	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
19	Kab. Waropen	-	620.581.680,00	853.458.820,00	1.474.040.500,00
20	Kab. Supiori	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
21	Kab. Mamberamo Raya	-	5.408.413.237,00	10.224.041.214,00	15.632.454.451,00
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
23	Kab. Yalimo	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	IUPH	PSDH	DR	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)
		-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
24	Kab. Lanny Jaya	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
25	Kab. Nduga	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
26	Kab. Puncak	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
27	Kab. Dogiyai	-	556.945.021,00	-	556.945.021,00
28	Provinsi Papua	1.058.367.900,00	7.240.285.282,00	-	8.298.653.182,00
		6.578.077.500,00	42.079.679.456,00	36.749.856.524,00	85.407.613.480,00
XXXIII	PAPUA BARAT	-	2.663.825.262,00	4.595.276.120,00	7.259.101.382,00
1	Kab. Sorong	-	2.989.480.749,00	929.929.253,00	3.919.410.002,00
2	Kab. Manokwari	-	2.100.696.288,00	-	2.100.696.288,00
3	Kab. Fak Fak	1.178.820.000,00	4.637.302.222,00	7.351.142.314,00	13.167.264.536,00
4	Kota Sorong	-	2.361.808.608,00	463.365.502,00	2.825.174.110,00
5	Kab. Sorong Selatan	-	2.530.542.229,00	797.072.967,00	3.327.615.196,00
6	Kab. Raja Ampat	-	7.608.697.462,00	10.641.479.934,00	20.850.817.396,00
7	Kab. Teluk Bintuni	2.600.640.000,00	2.113.786.591,00	124.398.910,00	2.238.185.501,00
8	Kab. Teluk Wondama	-	6.670.754.891,00	11.847.191.524,00	20.000.948.415,00
9	Kab. Kaimana	1.483.002.000,00	8.402.765.154,00	-	9.718.400.654,00
10	Provinsi Papua Barat	1.315.615.500,00	-	-	-
	SUB TOTAL	23.258.770.558,00	559.469.010.164,00	457.585.421.861,00	1.040.313.202.583,00
	DANA CADANGAN TA 2009	48.134.648.000,00	107.003.323.200,00	111.645.104.000,00	266.783.075.200,00
	TOTAL NASIONAL	71.393.418.558,00	666.472.333.364,00	569.230.525.861,00	1.307.096.277.783,00

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TI Departemen

Antonius Suharto
NIP. 060041107

